

MAKNA AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN YANG MELAMPAUI

Hanif HANIF¹

¹Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.
Email: hanif@kwikkiangie.ac.id

Article Info**Keywords:**

Responsibility accounting;
Responsibility center;
Authority;
Responsibility;
Trust;
Religiosity.

Citation:

Hanif, H (2021) MAKNA AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN YANG
MELAMPAUI. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 21-
27

DOI

<https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.796>

URL:

[jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/
article/view/796](http://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/796)

Abstract

The concept of responsibility accounting accompanies the concept of responsibility center which means that any authority given to a manager over a business unit must be accounted for by that authority, especially the authority in achieving financial targets, both revenue and expenses. The concept of responsibility center and responsibility accounting are management tools to ensure that the entrusted manager truly upholds the trust by exercising the given authority and must dare to take responsibility for that authority in the future. This concept also emphasizes that a manager cannot be held responsible by his superiors for more than the authority given to him. More than that, this concept aims not to let in the management of the organization, managers throw responsibilities at each other or "scapegoat" others to escape the responsibilities of the work unit they lead. One of the functions of accounting is a tool for financial accountability, indeed the study of responsibility accounting is part of the realm of management accounting, but in a broader sense, the financial accountability of public companies can also be called "public accountability accounting". In this section, the irony occurs, accounting as a financial accountability tool sometimes "slips" into a manipulation tool. However, research at the level of society-based economy practice seems to show that the light of responsibility accounting remains illuminating and can even be referred to as "beyond responsibility accounting", because accountability accounting is not only interpreted as a material aspect, not limited to accountability to interested parties but accountability is related to religious values, namely, all things in this world will be accounted for in the future to God.

1. Pendahuluan

Carut marut, semraut dan kumuh, hampir di seluruh sendi-sendi kehidupan, itulah tontonan yang belakangan ini sering ditayangkan melalui siaran televisi dan sosial media. Di antara keadaan yang menyedihkan tersebut, masalah pertanggungjawaban adalah salah satu poin penting yang mulai memudar. Nilai-nilai kejujuran adalah laksana cahaya yang menerangi, sepertinya mulai redup cahayanya. Idealnya akuntansi adalah alat pertanggungjawaban, namun kreasi pelakunya, akuntansi "dimodifikasi" menjadi alat *tipsani* (*tipu sana tipu sini*). Tentu kita tetap optimis dengan mengatakan, tindakan *moral hazard* tersebut, sepertinya hanya bersifat insiden yang dilakukan oleh oknum tertentu. Memang, ada pemikiran dan harapan Peneliti seperti itu, sehingga Peneliti pun bertanya, adakah praktik yang masih menyisakan kilau dari cahaya akuntansi pertanggungjawaban? Untuk itulah Peneliti, mencoba mencari-cari, melihat ke kiri dan ke kanan, adakah praktik baik itu? Akhirnya, hati dan mata Peneliti tertuju pada praktik bisnis di level *grass root*, yakni praktik bisnis ekonomi kerakyatan yang bergerak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hipotesisnya, Peneliti akan menemukan "suasana" berbeda, bahwa praktik akuntansi pertanggungjawaban itu masih ada, ia belum mati sama sekali. Bahkan dalam kegiatan UMKM patut diduga tingkat pertanggungjawaban yang tidak hanya sebatas pertanggungjawaban terhadap rekan bisnis atau pertanggungjawaban terhadap karyawan, tetapi lebih dari itu ada praktik bisnis yang pertanggungjawabannya yang melampaui.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu unsur yang penting dalam manajemen, setiap kewenangan yang diberikan pada seseorang dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan di

kemudian hari, sesuai dengan kewenangan yang diterima (Anthony & Govindarajan, 2007; Suadi, 1997). Aksi Enron dan Arthur Andersen dan juga beberapa kasus yang mencuat di tanah air belakangan ini seperti maskapai penerbangan Garuda, dalam memanipulasi laporan keuangan adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak bertanggungjawab. Sepertinya kita telah terbiasa menyaksikan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab, perilaku hidup yang bertanggungjawab menjadi barang langka. Namun, kita optimis, tidak semua berperilaku seperti itu, sikap yang bertanggungjawab masih dapat disaksikan di beberapa praktek bisnis besar maupun kecil. Artikel ini lebih berfokus pada pada praktek bisnis usahan kecil dan menengah atau pada praktek bisnis kerakyatan.

Salah satu alat pertanggungjawaban adalah akuntansi khususnya pertanggungjawaban dalam bidang keuangan, hal ini dalam akuntansi dikelompokkan secara khusus menjadi akuntansi manajemen (Blocher et al, 2013; Hilton, 2008; Hansen & Mowen, 2005). Akuntansi mengandung dua dimensi : (1) dimensi informasi; (2) dimensi pertanggungjawaban (Suwardjono, 2018). Akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan mempertanggungjawabkan wewenang yang terukur secara keuangan (Blocher et al, 2013; Hilton, 2008; Hansen & Mowen, 2005). Pertanyaan penelitian adalah bagaimana akuntansi dimaknai sebagai alat mempertanggungjawabkan keuangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui makna akuntansi pertanggungjawaban dalam praktek ekonomi kerakyatan dan bagaimana akuntansi digunakan untuk tujuan tersebut.

1.1 Akuntansi Pertanggungjawaban Berbasis Akuntansi Modernis

Akuntansi pertanggungjawaban banyak di bahas dalam ranah akuntansi manajemen yakni akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban dan sekaligus mengukur prestasi pencapaian dari manajer yang memimpin pusat pertanggungjawaban tersebut (Anthony & Govindarajan, 2007; Blocher et al, 2013; Hilton, 2008; Hansen & Mowen, 2005). Namun, pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban terbatas hanya pengukuran kinerja keuangan saja. Di awal periode kerja, terlebih dahulu disepakati anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Anggaran disusun sesuai dengan jenis dari pusat pertanggungjawaban dan dalam anggaran terkandung target yang harus dicapai untuk setiap unit kerja sesuai jenis dan karakteristik pusat pertanggungjawabannya, artinya lain jenis pusat pertanggungjawaban tentu lain target anggaran yang dititipkan pada unit kerja tersebut. Anggaran menggambarkan wewenang dan tanggungjawab yang akan dipikul oleh setiap pusat pertanggungjawaban dan manajer yang memimpin pusat pertanggungjawaban tersebut. Contoh, karena jenis dan karakteristik *revenue center* berbeda dengan *profit center* maka anggaran untuk kedua pusat pertanggungjawaban tersebut juga berbeda susunan dan substansinya. Jika pada *revenue center* ditekankan pada nilai rupiah target penjualannya, sedangkan pada *profit center* adalah nilai rupiah dari pencapaian labanya, bisa dalam bentuk margin kontribusi, laba langsung, laba terkendali, laba sebelum pajak, dan laba setelah pajak (Anthony & Govindarajan, 2007). Dalam organisasi modern, anggaran sebagai bentuk “penugasan” atau “perintah kerja” kepada setiap pusat pertanggungjawaban. Dalam unit kerja yang tipe *expense center*, misalnya, bila ada anggaran yang tidak terserap, maka unit kerja tersebut dianggap tidak melaksanakan kerja untuk program kerja yang ada mata anggaran tersebut.

Hanya saja, akuntansi pertanggungjawaban dalam konteks ini, menekankan pada nilai rupiah anggaran dan pengukuran atas pencapaiannya, tidak mengukur kinerja non financial dari pusat pertanggungjawaban. Hal inilah yang dikritisi oleh Kaplan & Norton (2001) bahwa pengukuran kinerja tersebut tidak mencerminkan pencapaian kinerja utuh dan menyeluruh dari setiap pusat pertanggungjawaban. Menurut mereka banyak hal pencapaian kinerja yang tidak dapat dilihat dari pencapaian kinerja keuangan tersebut, maka pengukuran kinerja harus dilakukan secara komprehensif, baik kinerja keuangan dan non keuangan harus diukur, dan keduanya sama-sama penting (Kaplan & Norton, 2001).

1.2 Pengembangan Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban

Bentuk akuntansi pertanggungjawaban di luar akuntansi pertanggungjawaban berbasis akuntansi modernis, Peneliti kelompokkan ke dalam pengembangan konsep akuntansi pertanggungjawaban. Tentu telah banyak pengembangan praktik akuntansi pertanggungjawaban yang terungkap dalam berbagai penelitian dan publikasi. Mungkin yang mengembangkan akuntansi pertanggungjawaban tidak mengerti

dan tidak tahu bahwa mereka telah mengembangkan akuntansi pertanggungjawaban dalam praktik, karena memang hal tersebut bukan tugas mereka, para praktisi. Pihak yang mengembangkan konsep akuntansi pertanggungjawaban adalah akademisi melalui penelitian lapangan, kemudian melakukan abstraksi atas apa yang dilihat dalam praktik.

Peneliti akan banyak membahas pengembangan akuntansi pertanggungjawaban yang dipraktikkan oleh Saudagar Minangkabau, yang kebetulan berbasis penelitian di Rumah Makan Padang (RMP). Ada banyak keunikan dalam model akuntansi pertanggungjawaban tersebut yakni: tidak menggunakan anggaran sebagai “perintah kerja” dan pertanggungjawaban, tidak ada upah dan gaji tetapi bagi hasil atas terciptanya nilai tambah (value added), yang dihitung secara bersama-sama, seluruh perwakilan bagian di RMP, yang berkontribusi besar dapat bagi hasil besar, dan sebaliknya, pekerja bukan buruh tetapi mitra kerja (Hanif, 2015b; Hanif, 2017; Hanif et al, 2013; Hanif et al, 2015; Hanif et al, 2019; Hanif et al, 2018).

Keunikan akuntansi pertanggungjawaban terletak pada sistem bagi hasil yang diterapkan di RMP ini. Tidak ada upah dan gaji, hasil yang akan diperoleh setiap pemangku kepentingan didasarkan pada Laporan Keuangan Bagi Hasil Sistem Mato – yang perhitungan dan pembuatan laporannya dilakukan setiap 100 hari kerja. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini berlaku hukum “yang membuat laporan pertanggungjawaban, juga sekaligus pihak yang akan menggunakan laporan tersebut untuk memastikan hak bagi hasilnya atas nilai tambah yang tercipta terhitung secara akurat. Bahkan, jauh sebelum Laporan Keuangan Bagi Hasil Sistem Mato dibuat, setiap orang di RMP telah dengan sendirinya memprediksi, berhitung hasil yang akan diperolehnya. Misalnya, periode yang sedang berjalan (periode per 100 hari) masing-masing pihak mulai bisa memprediksi. Bagian cuci piring, akan mengetahui jumlah piring yang dicuci setiap hari, dan jumlah piring yang dicuci, secara relatif akan berkorelasi positif dengan pendapatan yang diterima RMP, semakin banyak piring yang dicuci, dalam mindset Tukang cuci piring, pendapatan RMP naik, maka pendapatannya sebagai Tukang cuci piring juga akan naik, Semakin besar nilai tambah yang tercipta di RMP maka semakin besar seluruh pemangku kepentingan mendapatkan penghasilan, dan sebaliknya. Berdasarkan karakteristik model bagi hasil ini akuntansi pertanggungjawaban secara relatif lebih terhindar dari tindakan moral hazard dibanding dengan akuntansi pertanggungjawaban berbasis akuntansi modernis (Hanif, 2015a; Hanif et al, 2019b; Chaniago, 2019).

2. Metode Penelitian

Paradigma interpretif digunakan dalam penelitian ini, salah satu paradigma penelitian ilmu sosial. Mengacu pada asumsi pengelompokan paradigma oleh Burrell dan Morgan, paradigma interpretif berada pada pertemuan dua asumsi social scientific reality, pendekatan subjektif atas sains dan keyakinan bahwa masyarakat tereregulasi atau teratur, dan oleh karena realita masyarakat sudah merupakan bentuk keteraturan yang tidak perlu dilakukan perubahan, maka tugas Peneliti adalah untuk memahami mengapa keteraturan realita terjadi (Kamayanti, 2016: 21).

Fenomenologi memiliki banyak aliran pemikiran pula dan dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl sebagai pendekatan dalam menggali dan mengungkap makna akuntansi pertanggungjawaban. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adian (2010) dalam Hanif (2015) dalam pendekatan fenomenologi Peneliti akan merumuskan “hakikat atas gejala sosial”, di mana kesadaran subjek terbuka terhadap gejala yang dipandang dari sudut tertentu, kemudian dilakukan serangkaian analisis untuk kemudian ditemukan hakikat atas gejala.

Metode penelitian menggunakan fenomenologi transendental yang digagas oleh Edmund Husserl yang berfokus pada studi tentang kesadaran, berpusat pada “Aku”, namun bukan “Aku” dalam ranah psikologi tetapi asumsinya “Aku” dalam fenomenologi adalah pusat dari lingkungan, yakni mengarah pada bagaimana “Aku” dalam tubuh “ku” yang mengambil ruang dan tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman (Husserl, 2006:6 dalam Kamayanti, 2016:150-151). Hasil akhir yang diharapkan mendapatkan makna atas fenomena sosial yang diteliti adalah sebuah hakikat yang berasal dari kesadaran murni.

Jadi, “Aku” di sini bukan pengalaman tetapi yang mengalami, bukan aksi tetapi yang melakukan. Peneliti memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang mengalami dan yang melakukan. Pendekatan ini diharapkan nanti menjelaskan makna akuntansi pertanggungjawaban dari apa yang dialami oleh tiga orang individu, Saudagar Minang, dalam mempraktekkan pelaporan bisnis sebagai

alat untuk pertanggungjawaban. Proses penelitian dilakukan dalam suasana alami, sehingga dapat mengungkap peristiwa dan fenomena secara apa adanya.

Kamayanti (2016: 153) mengemukakan bahwa analisis fenomenologi transedental selalu dimulai dengan noema, yakni analisis di tingkat permukaan atau pada tingkat “gejala”, setelah noema Peneliti akan melakukan bracketing, dengan memberi tanda kurung, atas apa yang Peneliti tangkap dari tekstur lain di bawah tekstur yang ada, untuk mendapatkan sebagai level pemaknaan yang lebih dalam noesis, dan noesis adalah kesadaran yang muncul akibat pengalaman pada waktu dan tempat tertentu, pemahaman relasi noema-noesis menghasilkan pemahaman lanjutan bagaimana noesis membentuk noema, tahap ini disebut intentional analysis, dan akhirnya seorang fenomenolog akan mampu mendapatkan kondensasi dari seluruh proses pemaknaan, bagian ini disedut eidetic reduction.

Orang Minang sejak dari dulu terkenal dengan jiwa saudagarnya, menyukai kegiatan bisnis. Agaknya aktivitas dagang sudah menjadi budaya bagi sebagian besar orang Minang. Orang Minang adalah sebutan yang lazim untuk masyarakat yang berasal dari Sumatra Barat. Kegiatan bisnis orang Minang, mulai dari usaha kecil, menengah, dan bahkan ada yang sudah tergolong konglomerasi. Usaha kecil dapat kita lihat pada perdagangan “kaki lima” di pusat perkotaan di hampir seluruh kota di Indonesia, Rumah Makan Padang.

Pada usaha menengah misalnya, membuka toko grosir, Restoran Padang (misalnya “Sederhana”), penerbit dan lain sebagainya. Mungkin juga sebagian telah menjadi “bos” yang sudah memiliki jaringan perhotelan bintang tiga ke atas, pengusaha properti, dan ekspor dan impor. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada usaha yang tergolong pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diamati di lingkungan Peneliti di Jakarta.

Unit analisis adalah pengusaha atau saudagar Minang yang bergerak dalam pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang difokuskan pada pemaknaan laporan akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban bisnis. Individu-individu yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas empat orang. Informan yang dipilih adalah informan yang bergelut dalam praktek bisnis kerakyatan. Praktek bisnis kerakyatan adalah bisnis yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan yang ciri utamanya bisnis dijalankan dengan prinsip gotong royong, dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dari seluruh stakeholders perusahaan. Informan adalah orang-orang yang benar-benar memiliki pengalaman yang mendalam di bidangnya. Informan yang akan digunakan disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Informan Terpilih

No	Identitas	Bidang Pekerjaan/ posisi/jabatan dalam organisasi
1	Bundani	Pelaku usaha menengah Rumah Makan Padang
2	Ibu Aut	Ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro
3	Hayad Usahaan	Pelaku usaha kecil menengah di pusat grosir Tenabang

* Nama informan bukanlah nama sebenarnya

3. Hasil dan Pembahasan

Latar belakang sosial dari ketiga orang Saudagar Minang ini adalah kental dengan nilai-nilai hidup budaya Minang yang memang relatif jauh dari kehidupan feodal, tetapi bersifat egaliter. Nilai-nilai itu tercermin dalam sebuah jargon gaya kepemimpinan yang disebut dengan “*tigo tungku nan sajarangan atau tigo tali nan sapilin (TTS)*”. Tigo bermakna tiga, tungku artinya wadah untuk memasak nasi, nan sajarangan artinya segaligus, serentak dan secara bersama langsung dimasak. Maka “*tigo tungku sajarangan*” tiga unsur yang bersama-sama, serentak dilaksanakan dan satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan TTS sama artinya dengan kepemimpinan kolektif. Di kampung-kampung Sumatra Barat kepemimpinan kolektif melalui tiga unsur kepemimpinan: alim ulama, cadiak pandai, dan pemerintahan. Ketiga unsur saling melengkapi satu dengan yang lain dalam memutuskan persoalan masyarakat Nagari. Konsep TTS dengan nilai-nilai budayanya, diinternalisasikan dalam kehidupan kepemimpinan di tingkat yang paling mikro di Minangkabau: di tingkat Jorong dan Nagari. Sehingga nilai-nilai kepemimpinan seperti ini, secara alamiah juga terpatrit di sebagian besar masyarakat Minang. Artinya, sudah menjadi budaya kumunal, melakukan pekerjaan secara kolektif. Kebiasaan hidup sehari-hari itu akan merambah seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam urusan berniaga, perdagangan, baik di tingkat kampung di Sumatera

Barat, maupun ketika seseorang pergi merantau dan hidup dengan masyarakat lain di perantauan. Meskipun hidup di rantau, umumnya orang Minang masih sangat kental merapkan nilai-nilai baik yang terbawa dari wilayah budaya di mana ia dibesarkan dan pernah menjalani kehidupan.

Budaya kerja kolektif ini banyak mewarnai pengelolaan usaha masyarakat yang berasal dari Sumatera Barat atau saudagar yang berasal dari Minang, terutama yang masih dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah (UMKM). Empat orang informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, menurut pengamatan Peneliti masih kental dengan budaya Minangkabau, terutama nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan TTS tersebut.

4.1. Makna Akuntansi Pertanggungjawaban oleh Informan Informan Bundani, Pelaku Bisnis RMP

Bundani mendirikan usaha RMP di tahun 1970-an dimulai dengan sebuah gerobak dorong, saat ini bisnis RMP sangat berkembang pesat, memiliki outlet 165 cabang yang berada di 15 propinsi di Indonesia, dan sampai 3 cabang dibuka di Kuala Lumpur Malaysia. Pengelolaan bisnis menggunakan bagi hasil sistem mato, dan merupakan bentuk akuntansi pertanggungjawaban yang melampaui karena dalam sistem ini relasi “majikan” dan “buruh” atau “pemberi kerja” dan “pekerja” menjadi kabur, agaknya dalam sistem ini tidak ada yang nama “buruh” namun yang ada adalah “mitra kerja”, karena para pekerja juga sebetulnya diposisikan sebagai pemilik juga. Jadi, manajemen RMP melalui kepemimpinan TTS dari Bundani, menerapkan manajemen kolektif yaitu pengelolaan usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong yang dicirikan pekerja di restoran tidak digaji tetapi mereka diberi kebebasan makan tiga kali sehari di restoran, dan setiap 100 hari mereka akan berunding untuk mengukur laba rugi usaha. Apabila didapatkan untung, maka akan dibagi dengan komposisi 50% keuntungan untuk pemilik, 50% untuk para pekerja. Porsi keuntungan untuk para pekerja akan dibagi lagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya, misalnya porsi untuk tukang masak agak lebih dari yang lain, karena tingkat keahlian yang dimilikinya. Konsep akuntansi yang kusebut sebagai akuntansi “manajemen kolektif atau tigo tungku sajarangan” agaknya lebih dari sekedar konsep bagi hasil yang dikenal sebelumnya. Dalam sistem berbagi hasil, yang berbagi hasil adalah pihak-pihak yang menyetorkan modal sesuai modal yang telah disetorkan baik diposisikan sebagai kreditor maupun dalam bentuk setoran modal. Tetapi dalam konsep akuntansi “manajemen kolektif atau tigo tungku sajarangan”, konsep bagi hasil terjadi antara pihak yang menyetorkan modal dan pihak yang menyetorkan “tenaga” sebagai karyawan. Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban powerfull berfungsi sebagai alat akuntabilitas karena melalui laporan akuntansi yang kredibel setiap 100 hari kerja nasib dan keberlanjutan bisnis 100 hari kerja ke depan ditentukan. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan dilakukan secara transparan, dengan perhitungan, penjualan 100 hari kerja dikurangi beban langsung tunai, dipotong untuk zakat 2.5%, dan dipotong lagi untuk dana investor dari nilai tambah bersih setelah dipotong zakat, setelahnya dibagi dua antara Pemilik-Pengelola dan para pekerja, di tingkat pekerja dibagi berdasarkan porsi mato yang dimiliki (Hanif et al, 2015, Hanif et al, 2019b).

4.2. Makna Akuntansi Pertanggungjawaban oleh Informan Ibu Aut Sebagai Pelaku Bisnis Mikro

Ditemukan praktek bisnis unik dari seorang Ibu Aut, yang saat ini sudah sepuh 76 tahun, tetapi masih menyempatkan waktu untuk beraktivitas, membuat makanan kecil (pastel, risoul, tahu isi, berbagai aneka minuman lainnya). Di akhir tahun seluruh keuntungan usaha dibagi antara pemodal dan para pekerja, sementara kebutuhan harian: makan, minum dan tempat tinggal pekerja tinggal bersama sang Ibu. Sempat terpikir oleh Peneliti mengapa Sang Ibu memiliki karyawan yang sangat loyal, sudah 30 tahun bersama Ibu Aut, sampai pekerja sudah punya anak dan cucu. Transparansi usaha menjadi kuncinya, para pekerja diberi ruang yang longgar untuk berkreasi, dan di akhir tahun semua sama-sam berhitung, Ibu Aut telah mencatat dalam buku harian tentang seluruh pemasukan dan pengeluaran, semua pekerja bisa melihatnya. Akuntansi pertanggungjawaban benar-benar memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan, karena seluruh jerih payah mereka terbayar lunas dengan keterbukaan dalam pembukuan tersebut. Sebelum hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, terlebih dahulu diperhitungkan zakat hasil usaha.

4.3. Makna Akuntansi Pertanggungjawaban oleh Informan Hayad Usahaan Pelaku Bisnis Tekstil

Bapak Hayat Usahaan adalah pelaku bisnis tekstil di Tanah Abang. Peneliti juga menemukan praktek yang sama. Ia sangat toleran dengan karyawan. Bagaimana Sang Saudagar juga menerapkan konsep akuntansi “lebih dari sekedar bagi hasil”, yang memposisikan karyawan sebagai mitra kerja, sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari usaha. Di setiap akhir tahun juga dibagikan “pembagian” untuk masing-masing karyawan. Kearifan hidup tergambar dalam perjalanan jatuh bangun kehidupan. Itu pulalah yang menyebabkan Bapak Hayat Usahaan lebih arif dan bijaksana kepada karyawan karena pernah mengalami hidup sampai pada titik nadirnya. Bapak ini berprinsip “...bisnis memang untuk mencari uang, tetapi untuk saya, melihat karyawan tidak tertekan dalam bekerja, dan berhasil memberikan “pembagian hasil” di akhir tahun, menjadi kepuasan tersendiri, karena hidup saya pernah lebih buruh keadaannya di banding karyawan saya...”. Ternyata inilah rahasia karyawan Bapak Hayat Usahaan awet bertahan bahkan dalam kondisi Pandemi Covid-19 tetap setia menjadi karyawan. Bapak Hayat Usahaan juga membayarkan zakat usaha setiap tahunnya.

5. Kesimpulan

Pertanggungjawaban mengandung makna religiusitas, seiring menjawab substansi dari pertanyaan kepada siapa Anda sesungguhnya mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pekerjaan ini, apakah hanya pertanggungjawaban kepada atasan, dari ketiga informan pertanggungjawaban bermakna religiusitas adalah bahwa dokumen laporan kinerja financial dari setiap pusat pertanggungjawaban, tidak hanya cukup sampai di meja atasan, tetapi hal itu juga cerminan dari setiap yang dikerjakan, dalam rangka mencari ridha Yang Maha Kuasa.

Akuntansi pertanggungjawaban yang melampaui tersebut dapat terwujud bila pengukuran kinerja keuangan setiap unit bisnis dilakukan secara transparan, tidak ada yang ditutupi dan tidak ada niat untuk menyembunyikan sesuatu, dalam rangka menutupi kinerja buruk telah terjadi. Ketiga pelaku juga membagi sebagian rezeki untuk zakat, infaq dan sadaqah. Dalam akuntansi pertanggungjawaban yang melampaui, bila kinerja unit bisnis buruk, maka harus dilaporkan buruk, apa adanya, walaupun ada konsekuensi pada reward yang diterima.

Dari analisis praktik akuntansi pertanggungjawaban oleh informan, akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya menyentuh pertanggungjawaban pada level materi tetapi lebih dari itu, pertanggungjawaban juga meliputi aspek spiritual. Pertanggungjawaban kerja tidak hanya pertanggungjawaban financial dan non financial dalam pekerjaan, tetapi pertanggungjawaban yang lebih hakiki, yakni pertanggungjawaban kerja ke meja atasan adalah merupakan penggalan kecil dari pertanggungjawaban kepada Yang Maha Tinggi yang melihat semua apa yang kita kerjakan.

Daftar Pustaka

- Anthony, Robert N., and V. G. (2007). *Management Control Systems* (12th ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin.
- Arief Suadi (1997), *Sistem Pengendalian Manajemen* Yogyakarta, BPFE
- Burrell, Gibson, Gareth Morgan (1994), *Sociological Paradigms and Organizational Analysis*, England Ashgate Publishing Limited.
- Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E., & Cokins, G. (2013). *Cost Management: A Strategic Emphasis* (7th ed.). Mc Graw Hill.
- Chaniago, Hasril (2019). *Kisah Hidup Haji Bustamam: Pendiri Restoran Sederhana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019
- Hanif. (2015a). Introducing Mato Based Profit-Sharing Accounting and its Synergy with Cooperative and Sharia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 1223–1230. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.163>
- Hanif.(2015b). Management Control System Design: An Interpretive Ethnography. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 119–126. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.018>
- Hanif . (2015c). Pencarian Makna Dibalik Akuntansi Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi*
- Hanif. (2017). (Re)Konstruksi Akuntansi Keuangan Bagi Hasil Sistem Mato. *Akuntansi*

- Multiparadigma*, 8(2), 1–15. Retrieved from <http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/505>
- Hanif, Ludigdo, U., Rahman, A. F., & Baridwan, Z. (2013). Memaknai Corporate Governance Berbasis Kearifan Lokal. In *Seminar Nasional Akuntansi (SNA)* (Vol. 16, pp. 4813–4835). Manado, Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hanif, Ludigdo, U., Rahman, A. F., & Baridwan, Z. (2015). *Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato: Etnografi Bisnis Restoran Padang*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanif, H., Rakhman, A., & Nurkholis, M. (2019). Building a Concept of Entrepreneurial Control, 8(4), 1198–1206. <https://doi.org/10.18421/TEM84-13>
- Hanif, H., Rakhman, A., & Nurkholis, M. (2019). Building a Concept of Entrepreneurial Control, 8(4), 1198–1206. <https://doi.org/10.18421/TEM84-13>
- Hanif, H., Rakhman, A., & Nurkholis, M. (2018). New Productivity Concept Based on Local Wisdom: Lessons from Indonesia. *J. Mgt. Mkt. Review*, 3(3), 96-103.
- Hanif, H., Rakhman, A., & Nurkholis, M., Pirzada, Kashan. (2019b). Intellectual capital: extended VAIC model and building of a new HCE concept: the case of Padang Restaurant Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2005). *Management Accounting* (7th ed.). Singapore: Thomson South-Western.
- Hilton, R. (2008). *Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment* (7th ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. Retrieved from 978-007-126555-3MHID 007-126555-4
- Jensen, M., C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure, *Journal of Finance Economic* 3:305-360, di -download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-meckling-76.pdf>
- Kamayanti, Ari (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religi Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh
- Kaplan, Robert S, Norton, David P. (2001). *The Strategy Focused Organization How Balanced Scorecard Companies Thrive in The New Business Environment*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.